

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP STRATEGI PENANGANAN ANAK JALANAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Menurut Chandler yang dikutip oleh Triton dalam bukunya yang berjudul *Marketing Strategic*, bahwa: Strategi adalah tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan, lembaga atau suatu organisasi, dan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini.

Sedangkan menurut *Child*, strategi adalah pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan yang akan di capai. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Strategi disusun pada dasarnya untuk membentuk '*response*' terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Perubahan eksternal tersebut tentunya akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan internal dari suatu organisasi. Sampai seberapa jauh suatu organisasi dapat memanfaatkan .peluang dan meminimalkan ancaman dari luar untuk memperoleh manfaat yang maksimal dengan mendayagunakan keunggulan organisasi yang dimiliki pada saat ini. Ketidakmampuan atau ketidakpedulian untuk melihat perubahan lingkungan eksternal ini akan membuat '*shock*' suatu organisasi, Sehingga Strategi berguna untuk menjaga, mempertahankan, meningkatkan kinerja serta keunggulan bersaing dari suatu organisasi.

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa organisasi yang mempunyai strategi yang jelas/ formal, lebih unggul (*outperformed*) kinerjanya

dibandingkan dengan organisasi tanpa/ tidak terformulasi dengan jelas strateginya.

Menurut Mardiasmo dalam Ningtiana et al., (2021) strategi adalah suatu cara yang dimana digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini akan mencakup sejumlah arahan yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai tujuan tersebut dan mengarahkannya pada tujuan tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Kotten dalam Salusu (2006:105) membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian. Empat bagian ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)
2. *Program Strategy* (Strategi Program)
3. *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)
4. *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Strategi dapat didefinisikan dan dikatakan sebagai suatu bentuk rencana untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang ingin dilakukan. Pada dasarnya, strategi adalah suatu proses merencanakan dan mengelola guna mencapai tujuan untuk dicapai. Oleh karena itu, taktik membantu mencapai tujuan dan strategi membantu melaksanakan operasional. Jadi, berdasarkan banyaknya definisi strategi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah jenis rencana dan taktik yang dirancang dengan cermat untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

Strategi Penanganan Anak Jalanan adalah upaya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak jalanan. Anak jalanan merujuk pada anak-anak yang tinggal atau menghabiskan waktu di jalanan dan sering kali terlibat dalam kegiatan yang berisiko, seperti bekerja di jalan, mengemis, atau terpapar pada berbagai bentuk eksploitasi. Tujuan utama dari strategi penanganan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, mengurangi risiko yang mereka hadapi, serta memberikan mereka akses ke pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang lebih baik.

B. DEFINISI ANAK JALANAN

Anak jalanan, tekyan, arek kere, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemistis sebagai anak mandiri-usulan Rano Karno tatkala ia menjabat sebagai Duta Besar UNICEF, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih-sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum sekadar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluar ganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengejutkan mereka.

Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena risiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari pekerja anak (*child labour*), anak jalanan sendiri sebenarnya bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua atau orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya di jalanan. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok (Surbakti dkk. (eds.) 1997).

Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di

jalan diberikan kepada orang tuanya Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab-biasanya kekerasan- lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara social emosional, fisik maupun seksual .

Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak- anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala risikonya (Blanc & Associates. 1990; Irwanto dkk. 1995; Taylor & Veale. 1996). Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Munculnya Anak Jalanan

Anak jalanan yang ada di perkotaan tidak hanya muncul begitu saja tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sudrajat (1996:154) mengemukakan penyebab munculnya anak jalanan meliputi tingkat mikro, mezzo dan makro, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat mikro (*immediate causes*)

Yakni faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya seperti lari dari keluarga, dipaksa bekerja, berpetualang, diajak teman, kemiskinan keluarga, ditolak atau kekerasan atau terpisah dari orangtua.

2. Tingkat Mezzo (*underlying causes*)

Yakni faktor di masyarakat seperti kebiasaan mengajarkan untuk bekerja sehingga suatu saat menjadi keharusan dan kemudian meninggalkan sekolah, kebiasaan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan karena keterbatasan kemampuan didaerahnya.

3. Tingkat makro (*basic causes*)

Yakni faktor yang berhubungan dengan struktur makro, seperti peluang pekerjaan pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian yang besar, urbanisasi, biaya pendidikan yang tinggi dan perilaku guru yang diskriminatif, belum adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan.

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah sebagai pilihan hidup yang menyengkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu, Anak jalanan bagaimana pun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian kita semua. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang taraf tertentu belum mempunyai bentuk mental emosional yang kokoh, Sementara pada saat mereka harus bergelut dengan jalan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak penampilan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, sampah masyarakat yang harus diasingkan.

Pada taraf-taraf tertentu stigma masyarakat yang seperti ini justru akan memicu perasaan alineatif mereka yang pada gilirannya akan melahirkan kepribadian introvert, cenderung sukar mengendalikan diri dan sosial. Padahal tak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa untuk masa mendatang. Seorang anak dikatakan jalanan, bukan karena dia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi anak jalanan disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

Orang tua juga sering bertengkar akan mempengaruhi sikap dan mental anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga juga sangat berpengaruh buruk terhadap kondisi anak. Banyak anak merasa bosan tinggal bersama orang tuanya karena merasa tidak nyaman dengan kondisi dalam keluarganya. Hal ini menjadi penyebab anak lebih memilih hidup di jalanan dibandingkan harus tinggal di rumah bersama orang tuanya. Anak akan mencari lingkungan baru di luar rumahnya sehingga tidak menutup kemungkinan akan akan terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat seperti kebanyakan anak-anak remaja yang hidup di pinggir jalan. Ketidakharmonisan juga bisa terjadi antar hubungan orangtua dan anak. Perbedaan pendapat dan kesalahpahaman menjadi penyebab pertengkaran, apabila hal ini terus berlanjut dan tidak ada penyelesaiannya akan menimbulkan ketidaknyamanan antara kedua pihak.

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan, kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya dipeoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapatkan pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhan sebagai manusia. Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar atau anak tidak mampu yang selayaknya mendapatkan pengasuhan dari negara. Sebagian besar anak jalanan memang merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa anak jalanan bagaimana kondisinya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan Negara.

Anak yang memiliki masalah keluarga cenderung akan mencari pelarian diluar lingkungan keluarga yaitu dalam kelompoknya. Anak akan mencoba menunjukkan eksistensinya yaitu dengan adu kekuatan fisik. Dengan itu mereka itu akan mendapat pengakuan dari orang lain. Kemampuan berkelahi diperoleh anak jalanan dari pergaulan dalam kelompoknya. Anak jalanan cenderung bersifat malas karena faktor tekanan yang kuat terhadap jiwanya. Hal ini disebabkan anak jalanan harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Keluarga anak jalanan adalah keluarga yang berada pada tingkat

ekonomi yang rendah yaitu keluarga yang mengalami kesulitan secara ekonomi dan sosial.

Sehingga hampir semua keluarga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup termaksud anak-anaknya. Keluarga anak jalanan yang berada pada taraf kemiskinan. Tidak mampu memenuhi biaya pendidikan. Pendidikan keagamaan, juga tidak diberikan orangtua terhadap anak. Orang tua juga tidak memberikan teladan dalam pendidikan keagamaan. Orang tua itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Anak jalanan atau biasa disingkat anjal adalah potret kehidupan anak-anak yang kesehariannya sudah akrab di jalanan. Dan mungkin kita sudah tidak asing tentang sosok ini, karena disetiap penjuru kota, kita dapat dengan mudah menemukan mereka. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak ini? Mereka yang tergolong kecil dan masih dalam tanggung jawab orang tuanya harus berjuang meneruskan hidup sebagai anak jalanan dan terkadang mereka menjadi sasaran tindak kekerasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ada juga sebagian orang tua yang dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga, menganjurkan agar anak-anaknya untuk menghabiskan masa kecilnya sebagai anak jalanan.

Banyak faktor mengapa mereka menjadi anak jalanan, disamping masalah ekonomi keluarga salah satunya adalah kurangnya pendidikan. Usia mereka yang relatif masih kecil dan muda seharusnya masih dalam tahap belajar dan merasakan sebuah pendidikan, tetapi mungkin karena dengan alasan tertentu, mereka malah asyik menikmati hidup sebagai anak jalanan dan tidak mementingkan sebuah pendidikan. Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi sosialisasi atau pendidikan. Fungsi ini adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk kepribadiannya. Dalam keluarga, anak-anak mendapatkan segi utama dari kepribadiannya, tingkah lakunya, budi pekertinya, sikapnya, dan reaksi emosionalnya. Jadi dengan kata lain, anak-anak harus belajar norma mengenai apa yang bersifat baik baginya dan norma-norma yang tidak layak di dalam masyarakat.

Keluarga anak jalanan adalah keluarga yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah yaitu keluarga yang mengalami kesulitan secara ekonomi

dan sosial. Sehingga hampir semua anggota keluarga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk anaknya. Keluarga anak jalanan yang berada pada taraf kemiskinan, tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, sehingga anak harus terpaksa putus sekolah karena tidak mampu memenuhi biaya pendidikan. Pendidikan keagamaan, juga tidak diberikan orang tua terhadap anak.

Orang tua juga tidak memberikan teladan dalam pendidikan keagamaan. Orang tua harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan anak selalu membutuhkan pengasuhan yang baik dari orang tua agar perkembangannya baik juga. Komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting dilakukan karena dapat membangun kedekatan orang tua dan anak. Dan memudahkan pembelajaran terhadap anak. Orang tua tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak dengan serius. Komunikasi anak dengan orang tua sangat jarang sehingga tidak ada kedekatan antara orang tua dan anak. Dalam kehidupannya, orang tua tidak memberikan nasehat dalam rangka membimbing perkembangan psikis anak. Aturan-aturan juga tidak diterapkan orang tua untuk mengatur kehidupan anak.

Anak dapat hidup bebas dan tanpa orientasi, meskipun masih banyak anak jalanan yang hidup bersama orang tuanya, namun kehidupan tersebut memang tercipta di jalanan, karena faktor kemiskinan membuat satu keluarga membentuk perilaku untuk mencari nafkah dalam kehidupan di jalanan. Tidak menutup kemungkinan, apabila kedua orang tuanya mencari nafkah di jalanan, maka karakteristik anaknya juga akan terbentuk di jalanan, sehingga pengaruh lingkungan lebih kuat dibandingkan dengan perhatian orang tuanya. (Ningsih, A., & Nurrahmah, S. 2016).

C. KONSEP PENANGANAN MASALAH SOSIAL

1. Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu ada pada setiap masyarakat di belahan bumi manapun. Selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, maka masalah sosial akan terus muncul tanpa bisa dihindari serta sekaligus akan terus mempengaruhi dimensi kehidupan setiap

orang. Korupsi, kenakalan remaja, disorganisasi keluarga, pendapatan yang rendah, drug abuse, kriminalitas, kekerasan dan sebagainya adalah masalah-masalah yang menunjukkan banyak orang yang hidupnya tidak nyaman dan terganggu. Masalah sosial ini penting dipelajari terutama oleh mereka yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas-aktivitas sosial, pengambil kebijakan serta yang mengkaji secara langsung gejala ini.

Dalam kajian ilmu sosial, ada kesulitan khususnya dalam melakukan generalisasi dari masalah sosial hingga menghasilkan sebuah definisi. Hal ini dikarenakan banyaknya aspek serta dimensi dari masalah sosial serta adanya relativitas persepsi masyarakat mengenai masalah ini. Satu kondisi sosial di sebuah masyarakat bisa disebut masalah sosial sementara di masyarakat lainnya tidak dianggap masalah sosial. Begitu juga dengan dimensi persepsi masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu mempengaruhi bentuk masalah sosial sehingga satu fenomena sosial yang dianggap masalah pada masa lalu saat ini tidak lagi dianggap sebagai masalah sosial dan begitu pula sebaliknya.

Perubahan masyarakat yang terus terjadi mempengaruhi munculnya masalah-masalah sosial baru, yang di masa lalu belum terjadi. Masalah sosial sangatlah berhubungan dengan persepsi serta nilai-nilai yang berlaku di sebuah masyarakat. Dengan demikian untuk mempelajari masalah sosial perlu disadari adanya kompleksitas dari bidang yang akan dipelajari. Banyaknya aspek dan dimensi dalam melakukan studi ini berimplikasi pada kearifan mengidentifikasi dan mengkaji masalah serta menentukan pendekatan dan strategi pemecahan masalah secara komprehensif.

2. Penanganan masalah sosial yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial:

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Pendidikan dan kesadaran masyarakat adalah kunci dalam penanggulangan masalah sosial. Program pendidikan yang menasar pemahaman tentang akar masalah sosial, nilai-nilai kesetaraan, dan tanggung jawab sosial dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat secara luas.

2. Kebijakan Publik yang Inklusif

Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada penanggulangan masalah sosial. Kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta melindungi hak-hak individu yang rentan.

3. Kolaborasi Antarlembaga dan Kemitraan Masyarakat

Kolaborasi antarlembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mengatasi masalah sosial. Melalui kemitraan yang kuat, berbagai pihak dapat saling mendukung, berbagi sumber daya, dan menciptakan solusi yang berkelanjutan.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Aktif

Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif merupakan elemen penting dalam penanggulangan masalah sosial. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program sosial dapat memastikan keberlanjutan dan relevansi dari solusi yang diimplementasikan.

5. Intervensi Sosial dan Program Perlindungan Sosial

Intervensi sosial dan program perlindungan sosial juga diperlukan untuk membantu individu dan keluarga yang rentan terhadap masalah sosial. Program-program ini dapat mencakup bantuan keuangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, layanan konseling, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan.

6. Advokasi dan Perubahan Kebijakan

Advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan progresif juga merupakan strategi penting dalam penanggulangan masalah sosial. Melalui kampanye, aksi protes, dan kerja sama dengan para pembuat

kebijakan, masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan memengaruhi perubahan yang positif dalam struktur sosial dan ekonomi. Berikut adalah lembaga-lembaga atau instansi yang berperan dalam penanganan masalah sosial :

1. DINAS SOSIAL

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang melakukan tugas tugas pemerintah dalam upaya kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); Dinas Sosial memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 4 tahun 1988). Menurut Ramadhani, Sarbaini, dan Matnuh (2016: 949) dinas sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaan tugasnya dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Dinas Sosial selaku pelaksana di bidang kesejahteraan sosial, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksanaan, pembinaan teknik dalam rangka pelayanan terhadap usaha-usaha sosial yaitu melaksanakan dan melakukan pembinaan di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, seperti halnya memberikan motivasi, memonitoring dan konsultasi.

Hal ini dapat diwujudkan melalui program sosial kemasyarakatan, salah satunya penanganan anak jalanan. Penanggulangan dan pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi.

Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap client agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang seperti :

1. Pembinaan Rehabilitas Sosial

Rehabilitasi adalah proses pemantapan dan pemulihan kesejahteraan sosial seseorang. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan orang-orang yang berurusan dengan masalah kesejahteraan sosial sumber daya yang mereka perlukan untuk kembali menjadi anggota komunitas dan masyarakat yang produktif pada umumnya. Serangkaian intervensi yang disebut rehabilitasi sosial ditujukan kepada mereka yang mengalami kesulitan sosial, emosional, atau fisik di masyarakatnya. Memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka serta mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat sebagai anggota yang berkontribusi adalah tujuan akhir.

a. Rehabilitasi fisik dan mental

Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Menurut Peraturan Pemerintah No.36/1980, tentang Usaha Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi didefinisikan sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan bahwa mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 dijelaskan bahwa Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sesuai dengan

kemampuannya. Ini berarti membantu individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya.

b. Kesulitan bersosial dan emosional

Menyatakan bahwa kurangnya kemampuan komunikasi sosial pada anak akan mengakibatkan anak-anak sulit untuk mengembangkan hubungan yang suportif dengan teman sebayanya, sehingga anak akan cenderung mengalami kesulitan ketika bersosialisasi dengan lingkungannya. Kesulitan bersosialisasi yang dialami oleh anak tersebut akan memberikan dampak tersendiri bagi anak, sesuai dengan pernyataan Safaria (2020:12) bahwa : “Anak yang sulit bersosialisasi dengan teman-temannya pada masa awal usianya, akan memiliki kecenderungan menetap sampai dia dewasa. Jika tidak mendapatkan penanganan yang optimal, kesulitan anak dalam bersosialisasi dengan temannya akan berpengaruh terhadap diri anak tersebut, sehingga akan memberikan dampak terhadap pencapaian kesuksesan pada masa depannya “. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa anak perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi sosial yang dimilikinya.

American Academy of Padiatrics 2012 dalam Maria dan Amalia (2016) menjelaskan perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap baik emosi positif maupun negatif. Anak mampu berinteraksi dengan teman sebayanya atau orang dewasa disekitarnya secara aktif belajar dengan mengeksplorasi lingkungannya. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati dan meniru hal-hal yang dilihatnya.

c. Pembinaan Rohani

Menurut pendapat Darminta (2019:16) pembinaan rohani merupakan usaha untuk hidup iman, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Serta mengajarkan nilai-nilai agama kepada seseorang “pembinaan rohani adalah pembinaan hati, yakni pembinaan yang bersifat menyeluruh, dapat berlangsung hanya jika dilaksanakan terus menerus oleh semua pihak dengan mengembangkan sekaligus daya-daya kemampuan jasmani dan rohani anak”.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada seseorang agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya mencerminkan nilai-nilai religius.

d. Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani rutin dilakukan untuk melatih kesehatan dan kebugaran badan setiap individu. Menurut Fransazeli (2018:8) Tingkat kesegaran jasmani yang dimiliki seseorang menjadi peranan penting dalam melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Tingkat kesegaran jasmani yang tinggi diperlukan oleh semua orang baik tua maupun muda. Dengan memiliki tingkat kesegaran yang tinggi, seseorang mampu melakukan aktifitas sehari-hari dengan waktu lebih lama dibanding seseorang yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang rendah. Menurut Farid (2017:2) Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga tubuh masih memiliki cadangan tenaga untuk mengatasi beban kerja tambahan. Sedangkan menurut Wahjoedi (2001:59) “kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat, tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta dengan cadangan energi yang tersisa ia masih mampu

menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya”. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan jasmani seseorang dilihat dari kemampuannya dalam melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, sehingga ia masih dapat melakukan aktifitas ringan lainnya dengan baik dan dapat melewati waktu dalam hari tersebut tetap bugar.

e. Pembinaan Sosial

sosial. Membangun hubungan sosial memungkinkan Menurut Pakar Sosiologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Arief Budiman, pembinaan sosial adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan saling menghargai antarindividu. Pembinaan sosial berkaitan dengan bagaimana individu belajar memahami norma sosial, serta mengembangkan identitas individu untuk berinteraksi dan menjalin koneksi dengan orang lain, sementara membangun identitas sosial membantu individu memahami peran dan kedudukannya dalam masyarakat.

f. Bantuan sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri, 2011) Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau sembako dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, dan atau masyarakat yang sifatnya selektif. Definisi bantuan sosial Menurut Pusat Penyuluhan Sosial (Tristanto, 2020) merupakan program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, serta membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada. Sedangkan definisi bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

254/PMK.05/2015 (Kemenkeu_RI, 2020) tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, sembako atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada individu, keluarga, atau masyarakat yang bersifat selektif. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan, melindungi rumah tangga dari risiko sosial dan perubahan kondisi ekonomi, serta memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Bantuan ini dapat berupa transfer dana, sembako, atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

D. KONSEP KESEJAHTERAAN ANAK

Adapun kesejahteraan anak di Indonesia dijamin oleh suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” (Bab 1Pasal 1). Adapun dalam hukum Islam perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Sebagaimana yang diuraikan dalam *Child and Family Services Review process*, ada tiga variabel kesejahteraan. Tiga variabel kesejahteraan dikonseptualisasikan dalam kerangka berikut yaitu: *Pertama*, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konsep ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orangtua, dan orangtua asuh serta

keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah. *Kedua*, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. *Ketiga*, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. Dalam kenyataannya, yang pertama adalah yang paling umum dan paling luas cakupannya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan perlindungan anak di antaranya yaitu dengan pelaksanaan peran dan fungsi keluarga atau keluarga pengganti, dan keberfungsian lembaga perlindungan anak dan penerapan sanksi terhadap pelaku perlakuan salah terhadap anak. Menurut Jhonson bahwa peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Dan telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah *Unicef (United International Children Educational of Fund)*.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak :

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap warga negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini dalam Pasal 2 KHA ayat 1 dan 2

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran kepentingan anak. Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 3 Ayat (1).

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diadopsi dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak selain dari non diskriminasi : hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, badan yudikatif. Maka kepentingan terbaik bagi anak harus dipertimbangkan.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sangatlah jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 6 ayat (1).

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Maka prinsip ini ada dalam Konvensi Hak Anak Pasal 12 Ayat (1).

E. PATOLOGI SOSIAL

Menurut Paisol Burlian, 2022 dalam bukunya. Patologi berasal dari kata *pathos*, yaitu penderitaan atau penyakit, sedangkan *logos* berarti ilmu. Jadi, patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antarmanusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau

berhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit”, disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

Dalam ilmu sosial, Perubahan yang terjadi dalam masyarakat inilah yang disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial dapat berupa perubahan ke arah positif dan negatif. Kedua bentuk perubahan ini sangat terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang cenderung ke positif adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat, namun perubahan sosial yang mengarah ke negatif seperti penyakit masyarakat adalah suatu masalah yang harus dihindari. Bahwa perubahan yang bersifat negatif ini timbul dari kenyataan akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Semakin meningkatnya gejala patologi sosial di suatu masyarakat, kondisi masyarakat akan semakin tidak stabil. Berbagai macam permasalahan sosial yang kita baca di media cetak dan disaksikan di media elektronik seakan-akan mengancam ketenteraman kita bersama.

Hassan Shadily mengatakan bahwa gangguan masyarakat ini merupakan kejahatan. Kenakalan remaja, kemiskinan, dan lain sebagainya merupakan hal yang harus dicari solusinya. Gillin dan Gillin sebagaimana yang diungkapkan oleh Salmadani, memberikan batasan tentang patologi sosial, yaitu pertama, patologi sosial adalah salah satu kajian tentang disorganisasi sosial atau *maladjustment* yang dibahas dalam arti luas, sebab, hasil, dan usaha perbaikan atau faktor-faktor yang dapat mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial seperti kemiskinan, pengangguran, lanjut usia, penyakit rakyat, lemah ingatan atau pikiran, kegilaan, kejahatan, perceraian, pelacuran, ketegangan-ketegangan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Kedua, patologi

sosial berarti penyakit-penyakit masyarakat atau keadaan abnormal pada suatu masyarakat.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit di dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan hal gangguan mental cukup besar kontribusinya terhadap waktu produktif dan ekonomi. Menurut Vebrianto, patologi sosial mempunyai dua arti pertama patologi sosial berarti suatu penyelidikan disiplin ilmu pengetahuan tentang disorganisasi sosial dan *social maladjustment*, yang di dalamnya membahas tentang arti, eksistensi, sebab, hasil, maupun tindak perbaikan (*treatment*) terhadap faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial (*social adjustment*). Kedua, patologi sosial berarti keadaan sosial yang sakit atau abnormal pada suatu masyarakat.

Indonesia sedang mengalami perubahan sosial yang sangat cepat akibat pertemuan dua kebudayaan masyarakat dunia. Hal ini memungkinkan karena perkembangan teknologi yang begitu cepat. Hakikat perubahan dari percepatan itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi pribadi, psikologis, serta sosial. Hakikat perubahan adalah faktor kekuatan yang dapat menjadi integrasi dan disorganisasi. Pertentangan dua kekuatan ini perlu dicermati.

Menurut Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi, bentuk pelaksanaan dan penerapan undang-undang ini tidak begitu jelas adanya sehingga orang-orang yang dijelaskan dalam kalimat Pembukaan UUD 1945 ini masih banyak terlihat dengan kehidupan yang sangat menyedihkan.

Adapun istilah atau konsep lain untuk patologi sosial adalah masalah sosial, disorganisasi *sosial/social disorganization*/disintegrasi sosial, *social maladjustment*, *sociopathic*, abnormal, atau *sociatry*/sosiatri. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa patologi adalah semua tingkah laku sosial (masyarakat) yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

Berbagai bentuk patologi sosial yang diungkapkan oleh para pakar ilmu sosial, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan masalah yang